

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya memang memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban. Namun, disaat kedua badan usaha ini mulai beralih melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tanggung jawab badan usaha tersebut tidak akan berubah. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik hanyalah sarana. Peralihan Bentuk Badan Usaha dari Konvensional ke Online ini tidak membedakan tanggung jawab suatu badan usaha, yang berbeda hanyalah media dilakukannya Perdagangan.

B. Saran

Perlunya sosialisasi dan penegasan terhadap badan usaha yang mulai berkembang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, bahwa badan usaha berbentuk badan hukum dan yang bukan berbadan hukum dapat melakukan kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tanpa mengkhawatirkan adanya perubahan dan perbedaan tanggung jawab badan usaha tersebut. karena Perdagangan Melalui Sistem Elektronik hanyalah sarana atau media dilakukannya perdagangan ataupun usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Asikin Zainal, 2019, *Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ishaq,H, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Mataram University Press.
- Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Depok, PT.Raja Grafindo Persada.
- Romindo, dkk,2019, *E-commerce: Implementasi,Strategi, dan Inovasinya*, Medan, Yayasan Kita Menulis.
- Safira Martha Eri, 2017, *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Ponorogo, CV.Nata Karya.
- Agus Sardjono, 2018, *Pengantar Hukum Dagang*, Depok, Rajagrafindo Persada.
- SerfiyantiniYustisia Cita, R.Serfianto D.Purnomo, Iswi Hariyani,2017, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Jember, Andi
- Sari Dian Cita,dkk, 2020, *Perdagangan Elektronik : Berjualan di Internet*, Medan, Yayasan Kita Menulis.
- Sjahdeini Sutan Remy, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya.

Jurnal

- Ayustina Eliya, 2020, *Hukum Bisnis E-commerce di Indonesia Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek UMKM di Indonesia*, Sumedang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang.
- Farezhi Moch Adrio, 2020, *Akibat Hukum Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum Yang Belum Terdaftar Di Pengadilan Negeri (Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Fuad, Muhammad,dkk. 2005. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Kornelius Benuf,2020 “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan, hlm.25.

Irmawati, 2011, “*Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*” oleh Irmawati, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis

Tunardy Wibowo T, *Penggolongan Badan Hukum*, <https://www.jurnalhukum.com/penggolongan-badan-hukum/> , diakses 12 Oktober.

Internet

Nayoan Aldwin, 2020, <https://www.niagahoster.co.id/blog/model-bisnis-ecommerce/>

RED, 3 Kewajiban Pelaku Usaha dalam PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kewajiban-pelaku-usaha-dalam-pp-perdagangan-melalui-sistem-elektronik> , diakses 4 Desember 2019.

Sora, Pengertian E-Commerce secara Umum dan manfaatnya, www.pengertianku.net diakses 24 Mei 2018.

Legal2us, Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum, <https://legal2us.com/perbedaan-badan-usaha-dan-badan-hukum> , diakses 29 Juni 2022.

Guru Ekonomi, Badan Usaha, <https://sarjanaekonomi.co.id/badan-usaha/> , diakses 21 Januari 2022.

Abraham, Syarat Pendirian Badan Usaha Berdasarkan Aturan Hukum di Indonesia, <https://www.polihukum.com/syarat-pendirian-badan-usaha-berdasarkan-aturan-hukum-di-indonesia> ,diterbitkan 26 Mei 2022

<https://www.kbbi.web.id>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2020 OMNIBUSLAW, Cipta Kerja (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573))

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Skripsi

Intan Mutiari Solihah, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Transaksi E-commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zarkawi Dalimunthe, 2020, *Tinjauan Yuridis Industri E-commerce Dalam Menetapkan Pasar yang Kompetitif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Medan.

Ayu Paramita, 2020, *Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.